



KPK Boyong Enam Saksi Beratkan Gidot

PONTIANAK, TRIBUN - Bupati Bengkayang non-aktif Suryadman Gidot dan mantan Kadis PUPR Bengkayang Aleksius menjalani sidang kedua sebagai terdakwa dugaan suap di Pengadilan Tipikor Pontianak, Jl Urai Bawadi, Selasa (11/2). Sidang kedua ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Ada enam saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Empat di antaranya merupakan terpidana kasus serupa yakni Bun Xi Fat, Pandus, Yosef alias Ateng, dan Rodi. Keempatnya sudah terlebih dahulu divonis bersalah dengan hukuman 18 bulan kurungan dan denda Rp 50 juta.

Dua saksi lainnya yakni Kabid Bina Marga PUPR Heri Pitriadi dan Kabid Sumber Daya Air PUPR Yayat Sutia-

wan. "Kita hadirkan enam saksi, empat saksi menyatakan bahwa mengakui telah memberikan uang kepada Pak Aleksius sesuai dengan dakwaan kami, ditambah lagi saksi Bun Xi Fat itu mengakui bahwa pemberian itu terkait dengan kebutuhan Bupati, sehingga semakin menguatkan dakwaan kami," ungkap JPU KPK Feby

■ Bersambung ke hal. 7



TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
SIDANG - Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Pontianak, Selasa (11/2) siang. JPU KPK menghadirkan enam saksi, termasuk empat terpidana pemberi suap.



KPK Boyong Enam Saksi Beratkan... Sambungan Hal.1

D usai persidangan.

Feby menyampaikan, pihaknya juga mendapati sebuah fakta baru. "Fakta baru yang terkuak ini terkait Pokir (pokok pikiran) dan akan kami laporkan ke penyidik untuk didalami," katanya.

Saat jaksa menghadirkan saksi Pandus, terkuak pula bahwa pada 2016, Pandus menyetorkan sejumlah uang ke Aleksius untuk mendapatkan proyek pekerjaan dari PUPR Bengkayang. "Itu dibenarkan, dan nanti kita pertimbangan dalam surat tuntutan," ungkap Feby.

Kemudian, dari hasil pemeriksaan saksi juga terungkap bahwa ada penambahan nilai pada APBD-P Bengkayang di luar mekanisme. "Benar ada penambahan, dari beberapa saksi, dan saksi dari Heri Pitriadi menyatakan bahwa penambahan tersebut ada tetapi di luar mekanisme penambahan APBD yang sudah ditetapkan oleh tim PUPR sendiri," kata Feby.

Ia melanjutkan, "Jadi tim PUPR sendiri membuat penambahan APBD itu hanya pada tanggal 29 Agustus 2019, yang jumlahnya hanya Rp 12 miliar lebih. Tiba-tiba pada 30 Agustus ditetapkan jadi Rp 20 miliar lebih, sehingga perhitungan penambahan sekitar Rp 7,4 miliar yang menurut saksi Heri itu adalah hal yang dia tidak tahu datangnya dari mana dan saat dia tanya ke saksi Marsindi bahwa itu adalah kebijakan dari Bupati sendiri," papar Feby.

"Untuk Dinas Pendidikan sudah jelas juga, kemarin ada penambahan Rp 6 miliar, tapi tidak dilaksanakan, dan itu sama dengan PUPR, tidak dilaksanakan, karena saksi-saksi takut untuk melaksanakannya, karena takut sudah OTT KPK duluan," pungkas Feby.

Sidang lanjutan Gidot ini mendapatkan pengawasan ketat dari pihak keamanan pengadilan maupun petugas KPK. Sejumlah polisi bersenjata lengkap tampak ber-

jaga-jaga di sekitar ruangan sidang.

Sementara itu penasihat hukum Suryadman Gidot dan Aleksius, Anel SH MH, mengklaim uang yang diberikan para pengusaha awalnya merupakan uang pinjaman. "Kalau mengenai keterangan para saksi itu, mereka itukan memberikan uang karena itu atas permintaan. Pada awalnya uang itu pinjaman. Intinya pinjaman dan setelah ditransfer uang baru ada disebut penggantian diganti dengan proyek, begitu," jelas Anel.

Ia menekankan, terkait proyek penunjukan langsung (PL) tidak pernah ada. "Yang persoalan OTT, pekerjaan yang dikatakan PL (penunjukan langsung, Red) itu tidak ada dan belum ada anggarannya. Yang disebut OTT itu hanya uang pribadi mereka yang diserahkan. Uang pribadi dari pengusaha," jelas Anel. Pihaknya masih menimbang untuk menghadirkan saksi yang bakal merintangi Gidot. **(fer)**